

BAB II

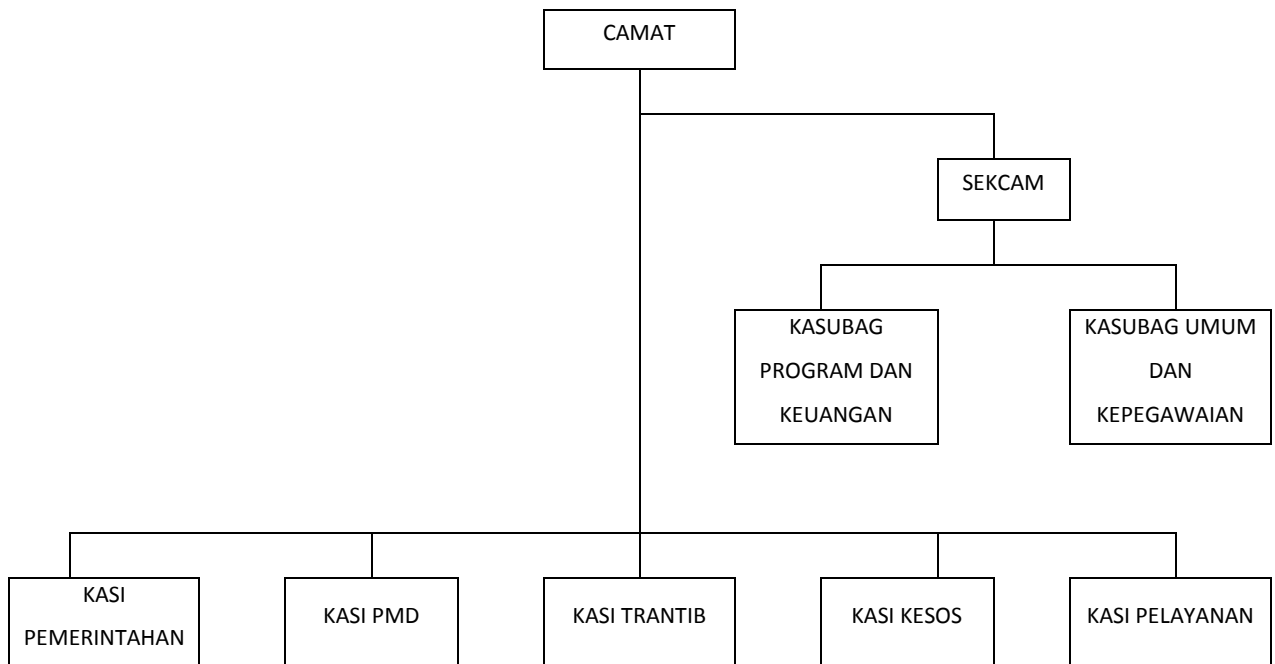
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukuhseti

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Dukuhseti terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI**



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukuhseti

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009

tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Dukuhseti berjumlah 20 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Cluwak	2		5	1	8	4	20	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	1	
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	1	1	2	
	- Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	3	8	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2017

Tabel II.4**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Dipl oma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		1	Kecamatan Dukuhseti			1	1			9	1	1	
	- Camat							1					1
	- Sekcam							1					1
	-Kasubag Program							1					

No	Uraian	<SLT		SLTA		Dipl		S1		S2<		Jumla	
		P				oma						h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	& Keu												
	-Kasubag Umum & Kepeg									1		1	
	- Kasi PMD								1				1
	- Kasi Trantib							1					1
	- Kasi Kesos							1					1
	-Kasi Pelayanan												
	-Kasi Pemerintahan							1					1
	-Staf Pemerintahan			1				1					2
	- Staf Subbag Umum & Kep												
	- Staf Subbag Program & Keuangan				1			1				1	1
	- Satpol PP												
	- Pegawai Non PNS	1		2	1			2	2	-	-	5	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	7	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit	6 Baik, 2 kurang baik	

peralatan kerja :		unit	
5	- Komputer	2	unit 2 baik
6	- Laptop	7	unit 4 baik, 3 kurang baik
7	- Printer	4	unit 4 baik
8	- Meja	41	unit Baik
9	- Kursi	180	unit Baik
10	- AC	6	unit baik
11	- Almari	13	unit Baik
12	- Filling cabinet	15	Unit 9 Baik, 6 rusak

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 8 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor (jika sudah di isi) dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 2 unit dengan 2 dalam kondisi baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 7 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 3 dalam kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 7 unit lagi untuk 9 pejabat yang belum mendapatkan laptop.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 4 unit dengan dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 7 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 41 unit dengan 41 dalam kondisi baik .

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 180 unit dengan kondisi, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 150 unit kursi rapat lagi. Kondisi jumlah AC di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi baik.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 11 unit dengan kondisi baik, ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

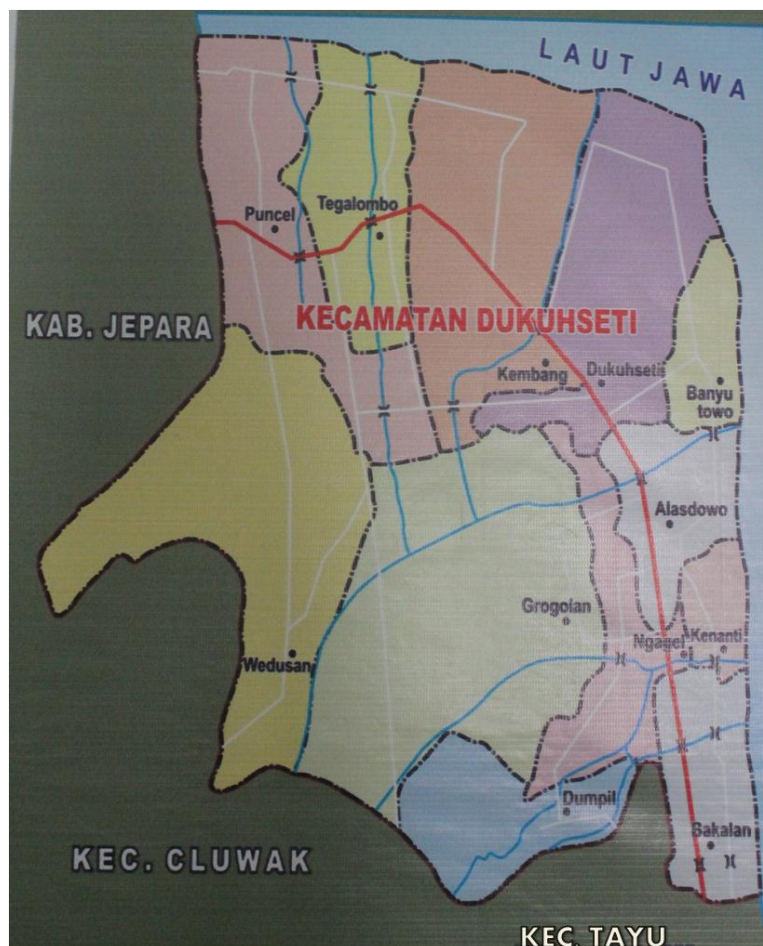
Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 15 unit dengan kondisi 9 baik dan 7 rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 7 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Dukuhseti

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.805,58 Ha. Secara administratif Kecamatan Dukuhseti dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kabupaten Jepara
- Bagian Timur : Laut Jawa
- Bagian Barat : Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Dukuhseti

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Dukuhseti dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Dukuhseti

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Wedusan	1.236,232	38	5	Swasembada
2	Grogolan	1.256,63	36	5	Swasembada
3	Dumpil	238,734	7	1	Swasembada
4	Bakalan	308,818	20	3	Swasembada
5	Ngagel	4.659,63	49	7	Swasembada
6	Kenanti	175,097	9	1	Swasembada
7	Alasdowo	408,433	31	4	Swasembada
8	Banyutowo	115,890	11	2	Swasembada
9	Dukuhseti	776,97	36	4	Swasembada
10	Kembang	1.241,887	34	4	Swasembada
11	Tegalombo	645,455	29	3	Swasembada
12	Puncel	992,453	45	7	Swasembada
Jumlah		12.056,23	345	46	

Sumber: Kecamatan Dukuhseti dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Dukuhseti memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.633 jiwa, yang terdiri dari 28.617 jiwa laki-laki dan 29.016 jiwa perempuan. Banyaknya Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Dukuhseti berdasarkan data kependudukan pada tahun 2016 adalah sebanyak 22.220 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 1.373 jiwa per km². Profil kependudukan Kecamatan Dukuhseti digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.7**Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Dukuhseti**

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	2.215		2.070		4.285	100
2	5-9	2.330		2.140		4.470	100
3	10-14	2.388		2.243		4.631	100
4	15-19	2.490		2.327		4.817	100
5	20-24	1.943		2.074		4.017	100
6	25-29	1.871		1.935		3.806	100
7.	30-34	2.034		2.047		4.081	100
8	35-39	2.004		2.065		4.069	100
9	40-44	1.934		2.121		4.055	100
10	45-49	2.080		2.102		4.182	100
11	50-54	1.919		2.035		3.954	100
12	55-59	1.755		1.826		3.581	100
13	60-64	1.304		1.309		2.613	100
14	65-69	936		957		1.893	100
15	70-74	660		754		1.414	100
16	75+	754		1.011		1.765	100
	Jumlah	28.617		29.016		57.633	100

Sumber: Kecamatan Dukuhseti dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut

Tabel II.8**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Dukuhseti**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	6.480	6.437	12.917	21,98%
2	Belum tamat SD/MI	4.336	4.143	8.479	14,43%
3	SD/MI	8.402	8.119	16.521	28,11%
4	SMP/MTs	5.515	5.894	11.409	19,41%
5	SMA/SMK/MA	4.110	3.829	7.939	13,51%

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
6	DI/DII	116	151	267	0,45%
7	DIII	152	190	342	0,58%
8	S1	482	393	875	1,49%
9	S2	16	8	24	0,04%
10	S3	4	2	6	0.01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut

Tabel II.9

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Dukuhseti

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.794	6.357	13.151	22,37%
2	Mengurus rumah tangga	9	11.834	11.843	20,15%
3	Pelajar/mahasiswa	4.854	3.580	8.434	14,35%
4	Pensiunan	117	64	181	0,31%
5	PNS	187	102	289	0,49%
6	TNI	13	0	13	0,02%
7	Polri	15	1	16	0,03%
8	Pedagang	250	451	701	1,19%
9	Petani/pekebun	4.016	1.385	5.401	9,19%
10	Peternak	39	8	47	0,08%
11	Nelayan	1.983	7	1.990	0,05%
12	Industri	24	3	27	0,05%
13	Konstruksi	12	1	13	0,02%
14	Transportasi	38	0	38	0,06%
15	Karyawan swasta	2.685	1.716	4.401	7,17%
16	Karyawan BUMN	172	67	239	0,41%
17	Karyawan BUMD	5	4	9	0,02%
18	Karyawan Honorer	30	27	57	0,10%
19	Buruh harian lepas	261	75	336	0,57%
20	Buruh tani	1.233	653	1.886	3,21%
21	Wiraswasta	6.950	3.310	10.260	17,46%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Dukuhseti

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	26.064	25.566	51.630	87,84%
2	Kristen	3.532	3.578	7.110	12,10%
3	Katolik	10	16	26	0,04%
4	Hindu	0	1	1	0,00%
5	Budha	4	2	6	0,01%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	3	3	6	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Dukuhseti didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan

angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Dukuhseti dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	n/a	n/a	0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	n/a	n/a	1	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	n/a	n/a	1	3	0
4	Jumlah kasus penganiayaan	n/a	n/a	23	18	10
5	Jumlah kasus pencurian	n/a	n/a	12	13	7
6	Jumlah kasus penipuan	n/a	n/a	3	2	1
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	n/a	n/a	0	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	n/a	n/a	40	33	18
9	Jumlah penduduk	n/a	n/a	57.633	57.633	57.633
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	n/a	n/a	6.94	5.72	3.12

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Dukuhseti dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Wedusan	4	2	6
2	Grogolan	4	3	7
3	Dumpil	3	3	6
4	Bakalan	5	3	8
5	Ngagel	10	5	15
6	Kenanti	5	2	7
7	Alasdowo	14	3	17
8	Banyutowo	2	3	5

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
9	Dukuhseti	9	6	15
10	Kembang	12	8	20
11	Tegalombo	7	3	10
12	Puncel	8	4	12
	Jumlah	83	45	128

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Dukuhseti dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Wedusan	10	9	19
2	Grogolan	17	17	34
3	Dumpil	19	11	30
4	Bakalan	21	13	34
5	Ngagel	30	4	34
6	Kenanti	15	1	16
7	Alasdowo	36	2	38
8	Banyutowo	25	5	30
9	Dukuhseti	43	3	46
10	Kembang	40	6	46
11	Tegalombo	35	8	43
12	Puncel	23	17	40
	Jumlah	314	96	410

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Dukuhseti periode 2012-2017 sebagai berikut.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		3,1		7,5	7,1	6,9	5,7	3,1	7,55	7,12	6,94	5,72	3,12	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2	Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%		64		48	50	52	58	64	44	46	49	55	61	0.91	0.92	0.94	0.94	0.95
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		76		50	55	63	66	76	45	50	59	64	74	0.90	0.90	0.93	0.96	0.97
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0.88	0.87	0.86	0.88	0.89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0.99	0.98	0.97	0.98	1.00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		43		27	31	35	38	43	23	27	31	34	39	0.85	0.87	0.88	0.89	0.90

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		47	50	55	60	65	45	48	53	59	64	0.95	0.96	0.96	0.98	0.98
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Dukuhseti sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Dukuhseti sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.15
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	51,840	43,080	44,505	38,841	18,438	NA	NA	44,505	38,841	17.688	NA	NA	100	100	0.95	39.34	20.20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11,100	10,740	12,477	8,686	8,626	NA	NA	12,477	8,486	8.276	NA	NA	100	0.97	0.95	10.32	5.84
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	7,020	11,930	18,344	12,096	10,034	NA	NA	18,344	11,071	9.994	NA	NA	100	0.91	0.99	11.88	7.88
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		26,500	22,789	8,440	7,678	NA	NA	22,789	7,615	7,678	NA	NA	100	100	100	13,08	7.61
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	7,276	8,296	8,296	8,445	8,739	NA	NA	8,296	8,445	8.739	NA	NA	100	100	0,82	8.21	5.09
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,803	13,157	13,792	12,177	13,014	NA	NA	13,792	12,177	12,258	NA	NA	100	100	0,94	153	58,45

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik		40,000	35,293	12,700	12,701	NA	NA	34,783	12,490	12.291	NA	NA	0,98	0,98	0,96	20.13	11.91
Program Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139,813	148,000	164,816	202,948	241,443	NA	NA	164,816	201,241	225.014	NA	NA	100	0,99	0,93	179.4	118.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	47,712	42,603	87,592	106,453	113,322	NA	NA	75,935	97,806	110.553	NA	NA	0,86	0,91	0,97	79.53	56.85
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,750	8,580	16,200	10,400	10,400	NA	NA	15,800	10,000	10,400	NA	NA	0,97	0,96	100	10.86	7.24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000	3,640	10,870	8,661	14,523	NA	NA	6,370	8,661	14,053	NA	NA	0,58	100	0,96	8.73	5.81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,085	5,750	13,979	4,420	4,658	NA	NA	13,884	4,420	4.658	NA	NA	0,99	100	100	6.77	4.59

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Dukuhseti merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Dukuhseti kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datan (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.